



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.18 WIB s.d. 15.32 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : Penetapan RKAKL TA 2024 dan RKP TA 2024
Hadir : 23 orang anggota hadir dari 50 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

- 5 orang anggota dari 10 anggota:
1. H. Nasyirulah Falah Amru, S.E.
 2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
 3. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.

4. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
5. Bambang DH

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam
2. Drs. Mukhtarudin.
3. Ir. Lamhot Sinaga.
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Zulfikar Hamonangan, S.H.
2. Rusda Mahmud.
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I. Pol

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Nasril Bahar, S.E. (izin)

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI)
2. Dadan Kusdiana (Plt Sekjen/Dirjen EBTEKE Kementerian ESDM)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera kami sampaikan,
Om swastiastu,
Nama buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Pimpinan komisi VII DPR RI, segera akan hadir nanti ada Pak Eddy, ada Pak Bambang, ada Pak Maman.
Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia beserta jajarannya, serta
Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita semuanya dikaruniai nikmat sehat wal'afiat dan *inshaa* Allah badai telah berlalu, Covid mulai surut meskipun kita harus terus waspada. Sehingga dalam keadaan sehat ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional kita, yakni melakukan rapat kerja yang memang telah diagendakan.

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 18 anggota dari 8 fraksi, untuk itu sebagaimana disarankan, eh kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 dan juga Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi.

Sekali lagi kuorum telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat, maaf, setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat kerja ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan bersifat terbuka. Apakah disetujui Bapak-Ibu sekalian?

Baiklah, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.18 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**



Baiklah, sebelum melanjutkan rapat ini kami meminta persetujuan Bapak-Ibu sekalian bahwa rapat ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam dari sejak rapat ini dimulai, maksimal maksudnya dan nanti dalam perjalanannya rapat bisa diskusikan tentang waktu. Setuju Bapak-Ibu sekalian ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral pada tanggal 5 Juni 2023 yang lalu, Komisi VII DPR RI telah mendengarkan pengantar dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk pagu indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Kemudian Komisi VII DPR RI juga telah melakukan pendalaman bahwa anggaran dalam RKAKL Tahun Anggaran 2024 bersama seluruh jajaran Eselon Kementerian ESDM Republik Indonesia dan menyetujui untuk meningkatkan pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, dari Rp6.776.152.351.000,- menjadi Rp11.070.000.000.000,- guna meningkatkan kinerja dan penerimaan negara bukan pajak, serta peningkatan ketahanan energi nasional, dengan rincian sebagai berikut, dipersilakan dari sekretariat untuk.

Bapak-Ibu sekalian.

Demikian terpapar di presentasi bahwa rincian dari pagu indikatif yang telah disebut berjumlah Rp11.070.000.000.000,- tadi.

1. Sekjen dari 545 miliar sekian tidak terdapat penambahan menjadi 545 miliar sekian.
2. Inspektorat Jenderal dari Rp206 miliar rupiah juga tidak terdapat penambahan tetap di 206 miliar sekian, sekian, sebagaimana terpampang di muka.
3. Direktorat Jenderal Migas dari 1,774 triliun terdapat peningkatan anggaran atau usulan tambahan sebesar 1.807.797.000.000 sekian-sekian, sehingga menjadi diusulkan dalam tahun anggaran 2024 yang akan datang menjadi Rp3.582.136.692.000,- dan seterusnya.
4. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dari semula 360.593.000.000 sekian, sekian diusulkan ada tambahan anggaran Rp1.570.000.000.000,- sehingga usulan total pagu indikatif Ditjen Kelistrikan di tahun 2024 menjadi Rp1.930.593.300.000,- dan sekian sekian.
5. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Minerba, yang semula pagu indikatif tahun 2024 menjadi 1.243.338.000.000 sekian, sekian, bahkan ini dikurangi usulan tidak ditambahkan, tapi dikurangi 28 miliar sehingga menjadi 1 triliun 218 miliar 338 juta 439 rupiah seterusnya.



6. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dari semula 56 miliar 859 juta 349 rupiah diusulkan ditambah 70 miliar menjadi 126 miliar 859 juta 949 rupiah dan seterusnya.
7. BPSDM yang semula 565 miliar 225 juta 557 sekian sekian diusulkan ditambahin, ditambahkan Rp20 miliar, menjadi 585 miliar 225 juta rupiah 557 dan seterusnya.
8. Badan Geologi yang semula 1.265.479.000.000 dan seterusnya tidak terdapat penambahan, sehingga tetap menjadi 1.265.479.000.000 sekian sekian.
9. BPH Migas, Hilir Migas semula 231.158.000.000 sekian sekian dan tidak terdapat usulan tambahan, sehingga tetap menjadi 231 miliar 158 juta 970 rupiah sekian sekian.
10. Direktorat Jenderal EBTKE yang semula Rp448.281.000.000,- sekian sekian diusulkan tambahan Rp831.050.000.000,- sehingga menjadi Rp1.279.331.000.000,-
11. BPMA semula 78.927.000.000 sekian sekian diusulkan ditambahkan Rp20 miliar, menjadi Rp98.927.560.000.000,- dan seterusnya.

Sehingga Bapak-Ibu sekalian, yang semula pagu indikatif Kementerian ESDM sebesar total 6.776.152.351.000 sekian ditambah 4.293.847.000.000 sekian sekian, sehingga usulan total pagu indikatif Kementerian ESDM di tahun 2024 menjadi Rp11.070.000.000.000,-.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan yang kesemuanya itu untuk meningkatkan kinerja dan juga meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan yang pasti adalah untuk meningkatkan daya tahan atau ketahanan energi nasional.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan usulan tambahan-tambahan tersebut dengan rincian-rincian nanti akan dirinci sesuai dengan juga masing-masing Direktorat Jenderal. Demikian Bapak-Ibu sekalian, setuju?

Silahkan.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Pimpinan, bisa, sebelum disetujui ya mohon maaf.

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII dan juga Pak Menteri ESDM dan seluruh jajarannya.

Saya ingin memberikan sedikit komentar terhadap rencana pagu anggaran ya mungkin ini bisa ditayangkan kembali, ditayangkan kembali terutama saya mengomentari yang pertama itu adalah di Gatrik ya. Di Gatrik saya melihat ini luar biasa, sudah ada penambahan 1,5 triliun dan seperti kita ketahui bahwa saat ini menyangkut masalah listrik ini secara nasional ya mungkin juga program Indonesia terang.

Kalau kita melihat dengan total anggaran penambahan yang menurut saya tidak terlalu signifikan ya, ini kita akan mencapai Indonesia terang itu lama

sekali. Jadi lama sekali dan ini perlu dipertimbangkan untuk penambahan lagi ya, penambahan lagi ya karena kalau kita mau jujur khususnya Kalimantan Tengah itu masih memerlukan anggaran kurang lebih 2 triliun baru bisa selesai listrik desanya. Jadi itu yang saya komentari.

Kemudian untuk Dirjen Minerba, Dirjen Minerba saya lihat ada pengurangan ya, ada pengurangan, kalau saya maunya nambah gitu, nambah apa yang mau saya tambahkan di situ. Terutama kita melihat *illegal mining* itu kan salah satunya adalah sulitnya masyarakat mengurus izin karena menyangkut masalah tata ruang yang tidak memberikan ruang, yang artinya yang positif untuk masyarakat itu.

Artinya yang punya mineral atau punya tambang yang ingin mereka tambang *gitu*, tetapi karena tidak ada survei ya atau tidak ada penelitian, atau apa yang sifatnya untuk mencari tahu di mana lokasi-lokasi yang memang memenuhi syarat untuk di tata ruang untuk menjadi wilayah pertambangan rakyat.

Nah sehingga ini salah satu mengurangi *illegal mining* ya, sehingga mereka itu diberikan kesempatan untuk dipermudah *gitu* untuk mereka bisa menambang dan ini khusus penambangan rakyat yang saya lihat di sini. Maka untuk itu menurut saya itu juga perlu mendapat penambahan, penambahan anggaran.

Itu saja komentar saya Pak Ketua, sekiranya ini menjadi perhatian, artinya riilnya saya ingin ditambah 2 dirjen ini, Gatrik dengan Minerba.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Luar biasa jadi bayangkan bukannya kita menghemat-hemat energi, kita ini malah minta ditambahin lagi.

Jadi terima kasih ini sebagai sebuah masukan, memang ini bagian dari pergulatan selama beberapa hari ini karena beberapa, kemarin kementerian sudah telah mengajukan semacam pagu indikatif dari pemerintah. Tapi kami telah melakukan juga setelah telaah-telaah, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Willy tadi bahwa ternyata belum cukup penambahannya, begitu Pak Willy ya karena kurang lebih itu.

Ini saya kira saya minta pendapat juga teman lain karena kemarin ini sudah terlanjur masing-masing Kapoksi menyetujui ini *gitu*, jadi, *ko* agak beda ini. Coba mungkin dari PDI yang lain atau kita masukkan dan kita bahas teknis di peruntukan dananya itu sebesar itu, misalnya utamanya di wilayah

daerahnya Pak Willy, catat ya Pak Dirjen Gatrik, Pak Menteri ya karena bagaimana menjadi fokus.

Ini mohon maaf Pak Willy karena kemarin Kapoksi masing-masing ya Pak Gunhar, Pak Doni, Pak ini membahas ini hasilnya.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan, Rico Dapil Papua Barat.

Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Willy, kemarin izin mungkin Kapoksi *nggak* ada dan saya masuk rumah sakit kemarin, ke rumah sakit, jadi tidak sempat, ikut di awal kemudian harus ke rumah sakit, jadi penutupannya *nggak* tahu.

Memang yang ingin kami sampaikan bahwa di dapil kami terkait dengan program BPBL dari Gatrik memang sangat banyak sekali yang masih kekurangan, sehingga kalau boleh anggaran ini ditambahkan.

Terkait dengan Minerba, saya pikir mestinya jangan dikurangi. Kalau boleh setidaknya *stay* aja di situ, tetap di situ, sayang juga kalau dikurangi, sementara pekerjaan yang *illegal mining* ini masih begitu banyak peti-peti yang beroperasi, sementara minerba anggarannya dikurangi.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, udah kita tangkap.

F-NASDEM (RICO SIA):

Terkait juga dengan PJ UTS, izin Pimpinan.

PJ UTS kami sangat kekurangan banyak sekali karena di daerah-daerah yang pedalaman 3 T yang terluar juga itu masih sangat butuh PJ UTS.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom.
Salam sejahtera.*

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bu Ratna dipersilakan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan serta seluruh sahabat-sahabat Komisi VII, Yang kami banggakan Pak Menteri beserta Pak Sekjen, Dirjen, ada Kepala SKK, Kepala BPH Migas dan jajarannya yang lain.

Kami mengerti Pak Ketua dan kami juga senafas dengan seluruh teman-teman yang berada di Komisi VII, perihal usaha untuk meningkatkan anggaran yang ada di Kementerian ESDM. Hal ini sangat dimaklumi mengingat bagaimana ESDM juga sudah memberikan PNPB yang sangat luar biasa untuk negara. Di tahun 2022 saja tercatat ada 351 triliun yang dihasilkan dari sektor migas, maupun nonmigas.

Waktu itu saya ingat kita sudah mengajukan penambahan anggaran, tapi hanya sedikit yang disetujui oleh Kementerian Keuangan dan di tahun ini dari 16 triliun yang diajukan oleh Kementerian ESDM, rupanya sudah ada 11 triliun yang di-approve oleh Kementerian Keuangan.

Tapi begini Pimpinan, kami ingin men-*stressing* lagi *breakdown* dari program-program yang dipersiapkan oleh Kementerian ESDM di tahun 2024. Mungkin di halaman 4 bisa semua sahabat-sahabat juga membuka begitu ya, saya agak tertarik dengan konversi minyak tanah ke CNG. Saya *nggak* ngerti ini RND-nya udah sematang apa ataukah sudah dilakukan *pilot project* di mana, *kok ujug-ujug gitu loh*, sementara masyarakat di Indonesia timur LPG aja belum pernah merasakan, tapi mereka sudah harus dipaksa meloncat ke CNG.

Apakah benar infrastruktur kita sudah sesiap itu untuk melaksanakan program tersebut, karena nilainya cukup besar Pimpinan ada 721,09 miliar yang dimasukkan ke situ. Padahal di sisi lain seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat kami sebelumnya, listrik itu adalah kebutuhan yang paling mendasar yang diinginkan oleh masyarakat saat ini *gitu*. Sehingga mungkin, mungkin Pimpinan kalau misalnya diizinkan ada pembicaraan ulang terkait program-program yang diberikan untuk masyarakat, ini akan, kami akan sangat berterima kasih.

Berikutnya terkait insentif konversi motor BBM ke motor listrik 350 miliar, benar apa yang disampaikan bahwa walaupun misalnya ini tidak ada yang mengikuti program konversi, maka uang ini akan utuh dikembalikan kepada negara. *Lah* daripada uang ini sudah ada Pak, kenapa *nggak* langsung saja diberikan untuk PJ UTS misalnya. Kita tahu di daerah 3 T itu ruas-ruasnya masih sangat gelap gulita *gitu loh*, sehingga hal ini lebih menyentuh ke masyarakat dan lebih dibutuhkan walaupun misalnya niatnya itu juga untuk menaikkan rasio elektrifikasi, maupun mempercepat transisi energi yang ada di Indonesia.

Yang terakhir Pimpinan, yang terakhir, kami juga ingin penjelasan terkait program pengeboran *slim hole*. Ini dimaksudkan untuk apa ya *gitu*, maka itu saya juga bertanya Pimpinan. Sehingga mungkin hal-hal ini sebelum ini semuanya disetujui, saya yakin semua sahabat juga setuju *kok gitu*, kita semua yang ada di sini kan memang bekerja untuk masyarakat *gitu*, memperjuangkan

konstituen di daerah masing-masing *gitu*. Sehingga sebelum ini di *dok*, kami mohon hal tersebut bisa dijelaskan lebih dulu oleh Pak Menteri maupun para dirjen yang hadir di sini.

Yang terakhir Pimpinan, yang terakhir ini mungkin di luar konteks anggaran ya, tapi saya menggunakan kesempatan ini untuk menggugah hati nurani kita semuanya. Terkait keluarnya PP Nomor 26 Tahun 2023, Pak Menteri sebagai mitra kami yang sangat kami banggakan dan kami kasihi ya, saya menggunakan hak saya juga untuk berbicara Pimpinan mohon maaf.

Kami ingin Kementerian ESDM di sini juga harus terlibat secara aktif untuk mengingatkan presiden, ada apa dengan diterbitkannya PP ini begitu. Kita tahu persis banyak sekali penjelasan-penjelasan di luar terkait sedimentasi *lah*, terkait pasir laut ya Pimpinan, sedikit, sedikit lagi belum 5 menit, Pimpinan.

Saya ingin Kementerian ESDM, Bapak menteri yang terhormat beserta dengan segenap jajarannya. Kalau kita mau ngomong masalah transisi energi, kalau kita mau ngomong masalah ekosistem yang bersih untuk anak-cucu kita itu semua harus dimulai dengan kebersihan lingkungan, keterjagaan lingkungan, *sustainability* lingkungan.

Nah kalau Kementerian ESDM tidak mengambil peran dalam hal ini, mengingatkan Bapak Presiden terkait terbitnya PP ini. Maka kami tidak tahu lagi harus menitipkan kepada siapa masa depan anak-cucu kami karena ini benar-benar sudah tidak masuk dalam sisi keekonomian maupun dalam sisi keberlanjutan lingkungan.

Sehingga melalui kesempatan yang baik ini, kami meminta Kementerian ESDM beserta seluruh *stakeholder* yang terlibat didalamnya untuk bisa meminta kepada Pak Presiden agar mengkaji ulang terkait terbitnya PP ini.

Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih atas waktunya, mohon maaf.

*Wallhul muafiq ila aqwamitthoriq,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Pimpinan, pimpinan, Sartono, Pimpinan. 1 menit.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Masih ada? Dipersilakan Pak Sartono.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):



Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan Komisi VII yang saya hormati, para Pimpinan, para sahabat Komisi VII yang kami hormati,
Pak Menteri dengan seluruh jajarannya.

Masukan begitu dan pertanyakan, inikan pemerintah ada kebijakan *automatic adjustment* itu Pak Menteri, tidak di kementerian maupun lembaga, di sekitaran 5% lah di dalam setiap anggaran begitu di tahun 2023 ini. Saya memohon dan meminta begitu Menteri ESDM itu betul-betul memprioritaskan ya belanja apa yang sudah menjadi suatu kesepakatan untuk khususnya apa pengalokasian program untuk masyarakat.

Nah ini kadang-kadang apa yang sudah kita putuskan karena ada apa itu alasan daripada *automatic adjustment* kebijakan itu kita terpotong itu program-program untuk masyarakat itu. *Nah* ini harus menjadi suatu catatan begitu bahwa ini harus menjadi utama itu, yang lain boleh lah di-*automatic adjustment* tapi ini harus kita perjuangkan apa dengan sekeras-kerasnya begitu, Pimpinan.

Pak Menteri, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada? Kita buka seluas-luasnya, Pak Ramson.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya *to the point* aja, ini PJ UTS ini kurang jelas ini diversifikasinya ini terhadap para di daerah-daerah, sebentar sekian tambah sekian. Perhitungannya yang bagus Pak Dirjen, soalnya nanti dievaluasi menteri posisinya kalau kurang bagus, padahal PJUTS itu perlu di daerah-daerah, jangan sebentar sekian, ini sekian, penggunaan anggaran *kan* harus tahu *benchmark* harga sudah harus tahu, di daerah-daerah harus tahu untuk PJUTS itu dan lagi makin lama makin minim, kualitas kurang.

Jadi ini perlu catatan ini PJUTS karena ini untuk rakyat ini di daerah ini perlu karena masih banyak di jalanan lampu-lampu jalan dari PLN juga belum ada, mau ke makam *nggak* ada, terus mau ke musola *nggak* ada, ke masjid *nggak* ada, di depan sekolah *nggak* ada. Itu perlu banyak lampu-lampu itu PJUTS itu Pak Menteri, jadi supaya catatan aja dalam hal penggunaan anggaran.

Jadi bukan hanya berbasis kinerja tapi *by the goal*, sekarang *goal*-nya bagaimana ini di masyarakat ini di daerah-daerah ini kan *gitu*. Jadi supaya sebentar sekian, sebentar sekian. Saya pikir *nggak* usah saya detailkan nanti terlalu di ini oleh apa namanya apa publik opini terlalu jatuh, cukup dikit-dikit aja saya kritik, kalau saya kritik lebih tajam saya bisa buat hitung-hitungan yang tajam itu semua. *Nah* itu saya kalau sudah membongkar suatu ini, mengkritik sesuatu *gitu* tapi saya jaga aja ya itu soal PJ UTS, PJ UTS, itu.

Terus yang kedua konversi tadi hanya konversi BBM ke BBG, ini program yang untuk petani ini sangat penting. Dirjen Migas sangat penting ini dan sudah bagus udah, rakyat senang, para petani senang dan jumlahnya juga cukup besar. Sehingga petani-petani di daerah saya sangat senang, berterima kasih ke Pak Dirjen, tentunya ke Pak Menteri ESDM juga karena saya beritahu bahwa ini program kerja sama Komisi VII DPR RI untuk dapil saya, tentu yang saya wakili bersama Pak Dirjen Migas dan Menteri ESDM, itu sangat bagus untuk petani.

Saya pikir yang dua itu aja dulu yang saya *stressing*, yang lain-lain cukup dulu karena ini juga apa namanya masih pagu indikatif.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Ramson tadi menggarisbawahi banyak hal.

Cukup atau ada yang lain lagi, dipersilahkan, mumpung.

Ya, dipersilakan Pak Ridwan.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota, Pak Menteri beserta jajaran dan mitra yang lain, SKK Migas dan BPH Migas, BPMA.

Ini kita akan bahas pagu anggaran, saya menginginkan apa yang tadi diusulkan oleh sahabat sebelumnya kita jangan ada pengurangan, meskipun sudah diputuskan oleh Poksi, tapi Poksi itu sifatnya adalah *guidence* saja, keputusan ada di raker ini. Kalau raker ini tidak bisa menganulir keputusan Poksi ya *nggak* perlu ada raker *kan*, kita langsung aja, keputusan Poksi itu keputusan.

Sehingga kenapa perlu raker? Karena ya tadi itu, cuman masing-masing Anggota bertanggung jawab kepada Poksinya, seperti PDIP kalau keluar dari

apa yang digariskan Poksi biar tanggung jawab sendiri, tapi keputusan rapat kerja hari ini adalah keputusan final. Sehingga saya mengusulkan Dirjen Minerba ini kita harus tingkatkan kualitas kerjanya, sehingga jangan ada pengurangan, jadi paling tidak tetap. *Nah* itu yang pertama.

Terus yang kedua, kita ini sekarang membahas anggaran 2024. Anggaran 2024 ini *inshaa* Allah berjalan setelah pemilu, Februari 2024 kalau ada pemilunya *kan*. Jadi paling tidak Maret *kan*, sehingga kita jangan berpikiran kegiatan-kegiatan apa namanya dapil kita *full kan*, sehingga yang saya harapkan ya itu di Dirjen Migas, infrastrukturnya harus kita dorong agar di 2024 itu sudah selesai semua.

Termasuk infrastruktur lainnya, ada Cisem, Sei Mangkei dan lain-lain, itu yang kita tingkatkan. Jadi kegiatan-kegiatan dapil itu kita kurangilah dengan harapan memang Pemilu 2024, cuman *kok* kayaknya tertunda *gitu loh*.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya ini kalimatnya Pak Ridwan luar biasa, mengingatkan kita semuanya agar pemilu tetap tidak tertunda *kan* begitu intinya.

Baiklah, masih ada Pak Tif atau yang lain, kalau belum ini hal-hal yang menjadi catatan silakan nanti menjadi penekanan.

Baiklah, tadi yang disampaikan pertama oleh Pak Willy Midel ini tentang Dirjen Gatrik seyogyanya ya ditambah karena apa? Pengalaman listrik desa di tempatnya Pak Willy Midel Kalimantan Tengah ya itu masih sangat-sangat kurang.

Maka setidaknya nanti mari kita ini fokus nanti juga di dapil beliau, jadi mengusulkan dari Dirjen Gatrik naik ya. Berbahagialah Pak Dirjen Gatrik ya bahwa tadi yang jelas baru saja kita wa-wa-an dengan Pak Midel ini betul-betul aspirasi yang murni *kan* begitu.

Kedua juga Pak Niko, bagaimana PJUTS juga di mana-mana memberikan penambahan, setidaknya juga menyangkut Dirjen Minerba tadi perlunya ditingkatkan, *kok* malah dikurangi *gitu loh*. *Nah* ini yang menjadi catatan-catatan.

Selanjutnya adalah Ibu Ratna, terima kasih Bu Ratna mengingatkan kita semuanya tentang subsidi motor atau mobil listrik yang notabene memang keterminatan setidaknya, entah karena sosialisasi, entah karena *kok* nampaknya kayak *sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko gitu loh*

kurang lebih kayak *tetuko lah gitu, nah* kayak Pak Dirjen Migas ini namanya. Jadi apa *nggak yao*, kita misalnya digeser untuk hal yang lain *kan* demikian Pak.

Jadi terus juga menggarisbawahi isu yang mengemuka meskipun di sini nanti akan ada waktu khusus membahas tentang Perpres tentang Pasir Laut itu Bu Ratna ya karena dikaitkan dengan *net-zero emission*, transisi emisi dan seterusnya. Jadi harus bersifat komprehensif, tidak semata-mata di ujung yang seolah di hulunya ada listrik dan sebagainya, tetapi juga faktor lingkungan menjadi pendekatan yang harus diperhitungkan.

Bapak Ramson, terima kasih mengingatkan kembali lagi juga PJUTS itu menjadi program. Selain kuantitas harus dinaikkan kualitas, tapi memang betul pengalaman di lapangan, saya kebetulan 3-4 hari yang lalu sama Pak Plt. Sekjen menerima apa, meresmikan beberapa PLTS di dapil saya, jangan iri yang lain nanti akan didatangi juga begitu.

Iya jadi penjelasan Pak Sekjen Plt. Sekjen cukup menggembirakan bahwa PLTS yang dipasang itu seluruh Indonesia kurang lebih sudah sampai sekian. Jadi kalau apa, sudah kurang lebih 5.000 kilometer kalau dijejer begitu, kalau setiap 50 meter ada 1 itu sudah menerangi seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi betul bahwa itu kan tidak sekedar jalan begitu tapi juga di kampung-kampung.

Kedua yang tadi dibawah Pak Ramson tentang konversi BBM ke BBG menjadi penting, ini karena juga nanti menyangkut tentang bagaimanaantisipasi termasuk volume gas yang harus kita siapkan karena ada konversi.

Terakhir Pak Ridwan Hisyam, jadi kenapa Minerba dikurangi? Justru ditambah, tadi juga kebetulan, boleh Kapoksi memutuskan tapi yang paling sah adalah di forum ini.

Oke, terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

Silakan Pak Menteri, nanti juga tambahan.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, kita sangat senang kalau Pak Dirjen langsung ke dapilnya Pak Ketua. Bagi kita yang terpenting bagaimana PJUTS itu ditambah dan kualitasnya bertambah, tanpa dihadiri dirjen, cukup kepala seksi, yang penting PJUTS-nya tambah.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mantap, ya itu *lah* kita semuanya berharap begitu, betul Pak Ramson.



Terima kasih.

Dipersilakan Pak Menteri menanggapi beberapa hal masukan tadi.

Terima kasih.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih.

Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Saya akan merespon yang memang pertama yang dari Pak Willy dan Pak Rico kawannya Pak Hanung. Memang kita *concern* dengan masalah kelistrikan di daerah-daerah yang terpencil. *Nah* kita juga beberapa waktu lalu juga mengirimkan anak-anak muda untuk melakukan studi, studi mengenai ketersediaan sumber alam yang memang bisa dijadikan dasar bahan untuk *men-generate* apa, listrik bersih.

Memang anggaran yang saat ini ya dari yang kita usulkan memang sekarang hanya untuk beberapa yang memang standar krusial terkait dengan infrastruktur energi untuk ketahanan energi kita ke depan. Jadi ya mudah-mudahan mungkin nanti ada ada kesempatan untuk bisa dipikirkan untuk dialokasikan kembali, akan sangat bermanfaat tapi kita akan komunikasi dengan PLN ya bagaimana memang bisa PLN bisa membuat program untuk bisa mengadakan listrik di daerah-daerah tersebut.

Kemudian yang kedua dari Ibu Ratna yang saya *nggak* bilang itu ya, yang tadi menyampaikan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kita udah hati-hati ini Pak nih.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi parno Pak Menteri, santai-santai aja jangan jadi parno. Santai-santai aja, makasih Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Mungkin ya Pak Ramson, jadi ini mengenai mitan memang kita melihat bahwa daerah-daerah terpencil ini kan masih banyak ya tergantung daripada mitan. Dan juga kita lihat kalau misalnya suplai-nya terganggu disebabkan oleh cuaca, kita melihat bahwa kemungkinan misalnya daerah Papua ya di sana *kan* ada pusat gas produksi ya memang bisa yang lebih dapat tersedia gasnya ya, sehingga kita memang membuat *link* fasilitasnya yang yang kita bisa *consider* untuk dipasang di sana.

Jadi dari Tangguh itu ya ada gas cukup banyak dan itu bisa kita manfaatkan untuk supply ke daerah-daerah Limut dan daerah terpencil itu ya. Jadi ini adalah program kita untuk memulai ya supaya memang bagaimana bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan apa, kebutuhan masak di daerah yang di daerah-daerah terpencil dan terluar.

Kemudian yang insentif 50.000 unit ini sebetulnya targetnya, kita targetkan di 150.000 unit. Cuma memang yang disetujui 50.000 unit, *nggak* apa-apa *lah* kita coba dulu karena ini memang merupakan program pemerintah ya untuk mengkonversi motor-motor tua ya.

Motor-motor tua ini ya beberapa *benefit* yang bisa kita yang bisa kita rasakan langsung adalah bahwa ada pengurangan emisi, pemakai bisa menghemat energi dan kita juga bisa mengurangi impor minyak ya untuk jangka Panjang. Jadi ini adalah program uji coba, kita ada 120 juta sepeda motor ya dan kalau ini semua bisa dijalankan pasti kita akan bisa menemukan industri baru.

Kemudian juga mengenai *slim hole geothermal* ya *slim hole geothermal* ini beberapa waktu lalu kita sudah bisa kita melakukan dua dan ini kita coba lagi untuk ke unit selanjutnya. Yang satu itu udah berhasil di Nage ya dan sudah ada yang sudah ada investor yang merespon ya karena dengan adanya data-data yang pasti ini ya yang itu udah mengurangi resiko kegagalan, mereka melakukan eksplorasi.

Jadi program ini memang masuk dalam programnya pemerintah ya, bagaimana kita bisa mempercepat pemanfaatan sumber-sumber geothermal untuk bisa mendukung kebutuhan energi bersih kita ke depan.

Kemudian *automatic adjustment* ya mudah-mudahan bisa dimanualkan Pak, jadi kita juga akan memperhatikan ini. Tentu saja kita berharap *nggak* ada satu dampak yang signifikan ya, sehingga memang pemberlakuan *automatic adjustment* itu bisa otomatis dilaksanakan.

PJUTS tahun ini tahun 2024 naik justru Pak ramson, dari 20.000 menjadi 30.000. Jadi ini terima kasih atas dukungannya dan terima kasih juga atas.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua.

Pak Menteri, ini sekarang-sekarang ini rakyat di dapil itu memerlukan tambahan-tambahan yang gelap-gelap itu, kalau boleh 2023 *kan* Pak Menteri *kan* punya kreativitas itu namanya *kan financial engineering lah*, diatur dari ini ke sini. Sehingga bisa tambah ya, sangat dihargai oleh rakyat kalau itu bisa dilaksanakan. Nanti saya minta di daerah pemilihan saya itu akan terus mendoakan Pak Menteri ya, kebetulan banyak santri juga kebetulan ya.

Terima kasih Pak Menteri.



MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Menjadi catatan kita Pak. Mungkin demikian Bapak Ketua, Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi inilah kita ya dalam menyusun RAPBN tahun 2024, meskipun ini masih bersifat pagu indikatif tetapi sudah mulai kita fokus *rank-rank*-annya. Jadi masing-masing program yang betul tadi karena tidak sekedar untuk menaikkan PNBPN, pendapatan negara bukan pajak yang hari-hari ini memang kita bersyukur, dari Komisi VII itu Kementerian ESDM itu luar biasa 351 triliun di tahun 2022 yang lalu.

Nah tetapi juga demikian kita juga komitmen untuk menaikkan atau menyangkut tentang ketahanan energi nasional, maka tadi disarankan oleh Pak Ridwan juga betul bahwa termasuk infrastruktur-infrastruktur untuk ketahanan energi mulai kita tuntaskan, misalnya Cisem Cirebon-Semarang dan juga ini yang bersifat *multiyear* juga demikian di Sei Mangkei dan Dumai-Sei Mangkei dan sebagainya. Ini memang itu arahnya, jadi kita bersyukur bahwa kesadaran kita di Komisi VII.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya dipersilakan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Tadi saya meminta statement beliau terkait yang PP 26 pimpinan, belum dijawab oleh Pak Menteri.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baru mau kita singgung sebenarnya Bu Ratna, bagaimana Pak Menteri dengan pasir laut *kan* begitu karena ada butir-butir pasir di laut. Saya ingat sekali ini apa drama radio yang, saya pernah jadi pemainnya di situ, saya jadi dokter Takwawa di triwulan. Hanya saja memang sekedar ulasan mungkin, tapi memang secara spesifik nanti akan dibahas di agenda selanjutnya Pak, Bu Ratna ya habis ini, begitu.

Bapak-Ibu sekalian.

Dari apa yang disampaikan dari uraian tadi Pak Menteri, kalau *toh* secara jumlah disetujui tampaknya nanti kita masing-masing Kedirjenan membahas secara spesifik, di mana anggaran itu bisa di-*transmit* ke program-program yang memang tadi disoroti rekan-rekan tadi. Misalnya Dirjen Gatrik nampaknya untuk Lides, listrik masuk desa dan juga penyambungan listrik baru dan sebagainya, kayaknya harus menjadi fokus kalau dari masukannya Pak Willy Midel tadi. Artinya kalau memang kita tidak mampu menambah secara postur secara keseluruhan, nanti akan ada dikurangi mungkin di tempat lain.

Kedua adalah menyangkut tentang PJUTS, betul ini yang kita harus menjadi pemahaman kita semua. Dari pengalaman empirik kita Pak Menteri, memang betul luar biasa pemanfaatan PJUTS itu luar biasa karena juga bisa mengurangi angka kemiskinan, apa mengurangi angka kriminalitas dan sebagainya-sebagainya, jadi ini penting sekali. Nanti dalam implementasi teknisnya kebijakan ini mungkin ini akan diperbesar volumenya dengan nanti di masing-masing kita akan pertajam kembali.

Dan juga tadi digarisbawahi konversi BBM ke BBG oleh Pak Ramson dan tadi ada CNG ya di *compressing natural gas*, itu akan menggantikan minyak tanah kalau *nggak* salah gitu. Nanti ini harus juga melalui pendekatan-pendekatan yang lebih apa komprehensif, sehingga program itu betul-betul tidak sekedar *trial and error* atau coba-coba saja.

Saya kira itu, saya minta pendapat pimpinan yang lain jadi forum hari ini kita.

Iya Pak Bambang.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Pimpinan. Pimpinan ketemu dengan Pak Menteri Pak, ini terkait dengan PJUTS Pak Menteri. Ini masih ada saja yang meminta syarat supaya ada rekomendasi dari bupati, ini, ini menyulitkan kita Pak Menteri, menghambat proses. Oleh karena itu dalam forum ini saya minta supaya kelengkapan ini supaya disederhanakan, cukup sampai **...(suara tidak jelas 42.27)...** saja Pak Menteri, tidak perlu sama dengan bupati apalagi karena yang berkepentingan itu adalah **...(suara tidak jelas 42.42)...** sebenarnya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ooh ya Pak Nasril, dipersilakan yang terhormat.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pertama, kami memberikan apresiasi kepada kita semua dan juga kepada pemerintah c.q Menteri ESDM, kami memberikan dukungan terhadap penyempurnaan ataupun penambahan infrastruktur energi kita. Yang kedua,



tentunya terima kasih Pak Dirjen Migas ya sudah ada angka untuk Sei Mangkei, ini merupakan kebanggaan kami khususnya dari pemilihan Sumatera Utara. Sehingga pada akhirnya ya ini bisa teraliri gas kita ya ke sekitar yang untuk kepentingan-kepentingan bisnis yang berada di kawasan industri Kuala Tanjung dan Sei Mangkei.

Saya pikir itu saja Pimpinan, cuma terima kasih kami kepada pemerintah.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya luar biasa.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan, daftar.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, Pak Mukhtarudin.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Langsung aja ya. Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatllahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Saya langsung saja menyoroti soal tambahan anggaran ESDM Tahun Anggaran 2024, yang terkait dengan konversi mitan ke CNG. Ini yang ada sedikit kegalauan saya ini tentang apa namanya konversi daripada mitan ke CNG ini. Terus terang CNG ini kan bagaimana kalau konversinya di Kalimantan Tengah, apa memungkinkan, apa CNG bisa diantar ke Kalimantan sejauh itu, sedangkan Bali saja masih ngambil ke Gresik. Dan CNG ini *kan* tidak menjangkau seluruh Indonesia, sedangkan konversi mitan ini masih ke dari daerah-daerah *remote*, daerah-daerah terpencil. Apa secara ekonomis dan segala macam memungkinkan.

Jadi saya kira ini perlu dikaji ulang, ini anggaran cukup besar 721 miliar dan ini saya meragukan, kata Pak Ketua tadi jangan *trial and error gitu*, jadi coba-coba di anggarankan, tahu-tahu *nggak* jalan, batal akhirnya lebih baik kita alihkan ke anggaran yang lebih yang memang sudah pasti bisa dilaksanakan.

Apakah sudah ada pengkajian secara mendalam ya, jangan terkesan hanya acara, perencanaan yang dibikin spontanitas tanpa ada sebuah perencanaan yang detail, nanti agak sulit dilaksanakan. Khususnya saya



menginginkan agar Kalimantan Tengah itu bisa semuanya yang hari ini masih mitan sudah menggunakan konversi.

Oleh karena itu saya berharap ini perlu di apa, saya minta penjelasan lebih lebih lanjut ini soal ini sebelum kita setuju Pak Ketua, saya minta lebih lanjut tentang CNG ini, bagaimana pelaksanaannya dulu daerah-daerah remote yang sulit dijangkau. Sedangkan Bali saja CNG-nya diambil dari Gresik, jadi gimana kalau dibawa ke pelosok pedalaman Kalimantan Tengah sana, sementara di sana masih menggunakan minyak tanah. Saya kira itu yang pertama.

Yang kedua tentang PLTS Atap, PLTS Atap ini *kan* di daerah saya ada 2 yang saya, aspirasi yang saya sampaikan. Tapi sampai hari ini yang 2022 itu sampai hari ini belum berfungsi, belum ada apa namanya migrasi antara ekspor-impor antara PLN ini belum sampai hari ini belum nyambung, masih harus ada mereka harus beli meteran, beli segala macam dan ini juga membebani daerah-daerah yang apa penerima manfaat dari PLTS.

Jadi tolong kebijakan ini agar lebih komprehensif dan koordinasinya dengan stakeholder lain, khususnya PLN agar ini, kemarin kita datang kasih, kemudian dipasang habis itu belum bisa diapa-apain *gitu loh*. Jadi 2022 itu loh Pak, jadi oleh karena itu yang soal PLTS Atap ini juga tolong dievaluasi lagi, kalau pun dilanjutkan, *nah* bagaimana mekanismenya dan koordinasinya dengan stakeholder, khususnya PLN.

Terima kasih, Ketua.

Wassalammu'alaikum warahmatillahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Andi Wittiri, sebentar ini tadi Pak Mukhtarudin menyampaikan beberapa catatan. Jadi tentang CNG, ini penting Pak Menteri. Tolong nanti dikasih gambaran, ini *compression natural gas* ini dalam bentuk energi yang juga nanti perlu dijelaskan, PLTS Atap.

Pak Andi Wittiri dipersilahkan.

F-PDIP (H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Rekan-rekan Anggota Komisi VII, yang saya hormati Pak Menteri bersama jajarannya.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih Pak Menteri, khususnya ke Dirjen Kelistrikan karena di kampung saya itu Pak, di pulau-pulau itu *alhamdulillah* pembangkit listrik tenaga surya itu sudah mulai diadakan atau susulan Pemprov Provinsi Sulawesi Selatan, yang tadinya terhalang di Badan Pertanahan Negara atau tentang lokasinya.

Alhamdulillah karena ada koordinasi dengan PLN dan Komisi II, *alhamdulillah* sekarang hampir semua permohonan pembangkit listrik tenaga surya di pulau-pulau itu sudah terpenuhi. Kenapa demikian Pak? Karena kalau kita tetap mengacu dengan pembangkit listrik tenaga diesel atau lainnya Pak, lebih mahal ongkos angkutnya bahan bakarnya itu Pak daripada harga bahan bakar. Sehingga ini sangat efektif sekali dan saya ucapkan terima kasih.

Yang kedua, saya mau menyambung tadi apa yang disampaikan rekan kami Pak Bambang terkait lampu tenaga surya Pak ya, lampu jalan itu. Ini agak sedikit memang ada kendala Pak Menteri karena yang memberikan lampu itu adalah dari Kementerian ESDM, terus yang kita minta rawat kepada Pemda. Saya sering komunikasi dengan pemda bahwa kamilah yang menjembatani untuk memasang lampu di pembangkit listrik PJU ini PJUTS, tetapi untuk merawatnya ini agak susah Pak karena biasa dipasang baru 3 bulan dipasang, lampunya sudah mati, Pak.

Sehingga kadang kita pasang di situ tiangnya ada, tapi lampunya *nggak* bisa nyala. Mungkin karena yang ahlinya di bidang listrik ini Pak, walaupun itu tenaga surya adalah PLN, mungkin lebih baik dalam perawatannya juga pun kita buktikan kepada PLN karena kalau kita berikan kepada pemerintah selalu mengelak, kami bukan ahlinya. Ini kendala kami di lapangan Pak, sehingga perlu kami sampaikan bahwa mubazir ini barang Pak, kalau tidak dirawat, padahal ini barangnya mahal, Pak.

Itu saja yang saya sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Andi Wittiri, betul sekali jadi PLTS tampaknya *sih* solusi terbaik untuk di dieselisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa diesel itu berkilo watt jam sampai 30 cen dolar PLTS, kalau intermiten kurang lebih ya mungkin 9 pun bisa bauran tinggi itu dan seterusnya, tetapi problemnya tadi.

Di mana-mana ini begini Pak memang, baterai saja *kan* kita tahu itu adalah sirkuit 5 tahun sekali harus diganti atau dirawat setidaknya. *Nah* karena kalau kita melihat Undang-Undang Kelistrikan itu adalah *the single buyers, the single seller* itu adalah PLN, lantas bagaimana dengan aset-aset yang notabene adalah aset kelistrikan, siapa yang menyentuh.

Kami Pernah dulu waktu itu semacam *workshop* dan juga semacam FGD bahwa sebaiknya memang kalau memang seluruh urusan listrik itu adalah PLN, biar listrik itu PLTS pun itu yang program dari Kementerian ESDM diurus juga oleh PLN. Tentu ada proses konsolidasi aset dalam konteks negara, tapi saya kira ini harus dilakukan segera, dirumuskan jalan keluarnya. Meskipun ada ketentuan sebetulnya yang merawat pemerintah daerah *kan* begitu, tapi lagi-lagi mestinya dirawat oleh ahlinya akan begitu. Saya kira itu dan ini menjadi pemikiran-pemikiran.

Silakan Pak Menteri ini ada dua dari Pak Mukhtarudin.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Pak Ketua, Pak Ketua, masih ada 1 Pak Ketua untuk yang tertinggal berhubung dengan apa yang disampaikan Pak Wittiri tadi.

Izin Pak Ketua dan teman-teman Komisi VII, langsung ke Pak Menteri. Beberapa waktu yang lalu kami FGD Pak, dengan PLN. Pertama, sehubungan dengan kelistrikan mungkin melalui Pak Menteri ESDM atau Dirjen Listrik, rakyat yang saya tahu hampir mungkin se-Indonesia bukan hanya di dapil kami, mereka punya keinginan agar pajak dari PJU Pak, pajak dari PJU yang dipotong langsung melalui PLN ke rekening mereka, yang langsung masuk ke atau setor ke pemerintah daerah atau kota itu tidak lagi diurus oleh kota atau kabupaten Pak karena rakyat kecewa, termasuk saya Pak, termasuk saya.

Mungkin juga yang sebelah saya juga iya dia bilang Pak, artinya mungkin kita semua kenapa? uang yang seharusnya dari lampu penerangan pajak penerangan itu harusnya untuk memperbaiki lampu yang mati, menambah lagi apa tiang-tiang ke tempat-tempat yang gelap *gitu* Pak pemanfaatannya.

Tetapi sepengetahuan saya juga karena pernah jadi kepala daerah Pak ya, jadi kayaknya yang efektif itu harusnya ya serahkan saja ke PLN. Sama ya serahkan ke PLN saja atau dikunci anggaran itu tidak boleh dipakai oleh pemerintah daerah ataupun kota ya untuk kepentingan lain, tapi dikembalikan kepada penerangan Pak.

Nah ini yang saya melihat menjadi hal yang cukup ya, cukup ramai *lah* mungkin kalau mau diviralkan, cukup *viral lah* seperti itu Pak. *Nah* maka oleh karena itu karena Kementerian ESDM ini masalahnya energi, ada Dirjen Listrik di sana mungkin kita bisa *cawe-cawe* di sana Pak, mungkin *lah* maksudnya itu untuk kebaikan ya karena ini aspirasi yang memang kita rasakan sendiri karena anggaran dari pajak itu tidak dikembalikan, mungkin tidak dikembalikan selayaknya untuk penerangan begitu Pak seperti apa yang dipotong *gitu*. Itu yang keluhan rakyat, mereka yang mengeluh karena tetap gelap *gitu* padahal udah bayar, dipotong *gitu*, malah tidak ada tiang di sana juga dipotong *gitu kan*.

Nah ini menjadi pemikiran kita karena kita berbicara tentang energi, berbicara tentang listrik saya pikir ini salah satu yang bisa di *cawe-cawe kan* oleh kita Pak.

Terima kasih saya kembalikan ke pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Luar biasa Pak Willy Midel, berbahagialah kita dalam kita menyusun proyeksi anggaran besar tapi semuanya *down to earth* kepada apa yang ada di bawah betul-betul. Jadi kita semuanya diminta untuk *cawe-cawe*, ini hati-hati Pak Midel menggunakan kalimat *cawe-cawe* itu agak sensitif hari-hari ya.

Saya kira dipersilakan di apa.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Pak Ketua, saya mau interupsi sebentar.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Karena kita ini kan raker untuk anggaran, supaya ini jadi final jadi Pak Menteri langsung bisa terima, silakan Ketua Poksi sampaikan pendapat akhirnya sekarang *kan* hadir semua. Apakah ini ada perubahan, jadi kita jangan keluar dari agenda acara, mau ditambah atau tetap. Kalau tetap semua ya tetap saja langsung di *dok*, digilir aja mulai dari PDIP dan lain-lain.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Persis itu yang mau kita lakukan karena barusan mau menyampaikan itu Pak Ridwan ada masukan, artinya Pak Ridwan *cawe-cawe* yang baik *gitu loh*, itu yang kita harapkan.

Saya kira demikian jadi memang betul proses itu sudah melalui proses, tapi betul tanpa juga mengurangi namanya juga ini hak *budgeting* setiap anggota. Di sini nanti akan menjadi titik fokus, meskipun katakanlah anggaran secara keseluruhan itu adalah Kementerian ESDM tambah 4 triliun 293 itu secara keseluruhan, nanti bisa saja di rapat Direktorat Jenderal kita sebagaimana fokus-fokus tadi yang disampaikan.

Saya kira itu sepakat ya saya akan kembali kepada masing-masing Poksi, apakah disetujui dari Fraksi Demokrat, maaf PDIP bagaimana? Apakah kita ini setuju?

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Pak karena tidak ada arahan dari pimpinan, saat ini tentu biar nanti mungkin masih ada waktu tidak terburu-buru menurut saya. Tetapi pada prinsipnya kita tahu bahwa ini Dirjen Minerba dengan Dirjen Gatrik tadi perlu diberikan anggaran yang ditambah dan ditambah lagi.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya *oke*, demikian pandangan dari PDI Perjuangan pada dasarnya setuju, namun demikian dengan catatan bahwa nanti ada 2 hal tadi, Dirjen Gatrik, Dirjen Minerba nanti dari angka yang secara keseluruhan ini nanti kita apa, tetapi semuanya harus transparan melalui rapat-rapat atau masing-masing kedirjenan.

Demikian, dari Fraksi Partai Golkar.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Kalau mau menambah anggaran di beberapa direktorat jenderal justru yang pas sekarang waktu pagu indikatif Pak Ketua, karena pagu indikatif ini akan dibawa kepada Menteri Keuangan, akan diolah, itulah nanti masuk di pidato Bapak Presiden yang akan kita putuskan lagi nanti Pak Ketua.

Jadi saya pikir waktu setengah jam ini bisa dibuat untuk menambah dan saya lihat Pak Ketua makin akomodatif saya lihat sama anggota ini sekarang.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kita ini menerima masukan lalu tidak wajib *cawe-cawe kan* tidak.

Oke jadi justru ini, ini kan tadi saya sebutkan bahwa penambahan sejumlah 4 triliun 293 miliar dan seterusnya itu, ini *kan* secara keseluruhan.

Apakah ini akan ditambah atau dikurangi kan itu pertama, kalau itu setuju lantas per masing-masing, kita kan minta komentar masing-masing Poksi *kan* begitu.

Nanti lantas bahwa betul ada aspirasi-aspirasi yang selanjutnya sebagaimana yang disampaikan tadi, tadi kan PDI Perjuangan. Sekarang saya masuk ke Golkar, apakah mau ditambah, dikurangi, di sinilah waktunya menurut Pak Ramson kita *mengutak-atik* APBN secara keseluruhan.

Dipersilakan yang terhormat Pak Maman yang mau bicara.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya ini tadi baru habis rapat dengan Baleg, baru pertama kali itu saya itu berada di posisinya Pak Menteri ESDM itu, ternyata agak berat juga jadi mitra *gitu*. Terus tadi saya bilang, ini *kok* jadi kalian nanya ke saya kayak, udah kayak mitra kalian *gitu*. Jadi ternyata memang jadi mitra itu luar biasa, jadi aduh saya *tuh* kalau setiap Ratna ngomong, saya nengok ke kiri, biar *nggak* dibilang pelanggaran hukum verbal, *nggak* ini ngawur orang ini, tapi ya udah.

Kalau saya justru sebetulnya langsung diketok aja Pimpinan karena saya pikirkan nanti forum habis ini kan ada agenda lagi yang lebih lanjut terkait konteks pengawas, agenda pengawasan kita. Pada dasarnya kalau dari Golkar setuju, namun saya ingin mengusulkan lebih jauh lagi dilakukan akselerasi percepatan rapat, ya udah pimpinan langsung ambil. Prinsipnya saya lihat semua udah, udah, udah kuorum, udah mufakat *lah*.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya tapi tetap bagaimana pun masih sirkuler masing-masing apa ini fraksi harus memberi pendapat.

Dari Gerindra, Pak ramson.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Ketua.

Ini untuk langsung *to the point* aja ya, Dirjen EBTKE ini tambahannya hanya satu proyek ya, bukan banyak untuk kepentingan daerah-daerah ya. Kalau hanya satu proyek berarti disiapkan tambahan lagi untuk daerah-daerah, seperti tadi PJUTS itu diperlukan daerah-daerah ya.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya kalau kita lihat dari pagu indikatif, pagu anggarannya Dirjen EBTKE cukup naik secara signifikan, penambahannya hampir 200% ini.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Tapi maaf Pak Ketua, itu hanya satu *project* PLTM Wabudory.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mana coba.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Di bawah Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

PLTM.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Padahal rakyat di daerah-daerah sangat memerlukan PJUTS secara kuantitatif dan juga peningkatan kualitas juga begitu, Pak.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah coba kita, *kok* saya agak kurang begitu

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Mungkin langsung ditambah 200 juta *gitu kan*.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Halaman 2 ya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Nanti urusan Menteri Keuangan *lah* setuju, nanti bila perlu kita ini, 200 miliar.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

200 miliar, mungkin Dirjen EBTKE bisa menjelaskan sekarang juga supaya apa yang dimaksud dengan, apa tadi yang dimaksud oleh Pak Ramson. Kenapa tambahannya secara signifikan 800 miliar tambahan *loh* dari anggaran 448 miliar naik menjadi 1,2 triliun, coba apa yang disampaikan Pak Ramson tadi.

DIRJEN EBTKE KEMENTERIAN ESDM RI (DADAN KUSDIANA):

Mohon izin Pak Menteri, untuk yang tambahan, itu pertama adalah untuk PJUTS karena di sebelumnya tidak ada Pak. Jadi untuk PJUTS di tahun depan 22.000, kemudian untuk PLTMH yang awalnya 5 kemudian menjadi 7 tapi ini yang kedua ini menjadi yang cukup besar. Sehingga menjadi termasuk yang tadi yang disebutkan oleh Pak Pimpinan.

Kemudian untuk insentif konversi motor dari motor BBM ke motor listrik, ini 50.000 kali 7.350.000 dan PLTS atap, jadi totalnya 831 miliar.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Begitu Pak Ramson dijelaskan oleh Dirjen EBTKE, penambahan 800 miliar itu dimaksudkan untuk tadi beberapa hal yang telah disampaikan *gitu*. Nanti untuk detail teknisnya karena betul PJUTS juga dipahami sebagai sebuah kebutuhan yang nanti harus ditingkatkan, sudah begitu.

Oke, terima kasih.

Selanjutnya Nasdem, saya kira pas *lah* ya karena memang sudah melalui pembahasan.

Selanjutnya PKB Mbak Ratna, saya lihat *kok* agak cerah ceria begitu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin mewakili kelompok komisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami menyetujui peningkatan anggaran Kementerian ESDM.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya fraksi, setelah PKB, Demokrat, Pak Sartono.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Terima kasih, Pimpinan.

Ini *kan* sudah melalui proses pendalaman kemarin ya yang luar biasa, kami bersepakat apa-apa yang sudah menjadi keputusan. Hanya saya mengingatkan untuk program dan anggaran yang sudah diputuskan di untuk 2023 ini Pak Menteri, untuk realisasinya dipercepat begitu, untuk yang 2024 bersepakat Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Sartono dari Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya dari Fraksi PKS, Pak Tif.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Sebetulnya sebelumnya *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Jadi sebelumnya di Kapoksi juga sudah dibicarakan. Ini kan baru pagu indikatif ya, nanti prosedurnya nanti dibawa diusulkan Kementerian Keuangan, nanti kan detailnya nanti kita bahas lagi kalau ada konsinyering lagi.

Tapi saya setuju dengan beberapa catatan teman-teman tadi, seperti PJ UTS baik yang untuk tahun 2024, Gatrik ada tadi dari Mbak Ratna itu pasir laut misalnya seperti itu. Walaupun kita memahami seperti konversi minyak tanah ke CNG ini *kan* di subsidi ya Pak Menteri ya? Selama ini minyak harga minyak tanah itu di subsidi kepada masyarakat dan memang menjadi beban juga. Sementara secara teknologi juga sudah ketinggalan dan 19 berapa, 19.000 ya, berapa harga 1 liter minyak tanah sekarang berapa Pak Dirjen, 19.000, berapa Pak Menteri?

Izin interaksi Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Hasilnya kurang lebih 13.000 tetapi harganya sekarang 2.500 yang di.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Karena satu liter yang dijual di sini.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya, yang di tempat daerah-daerah Limut.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Subsidinya 10.000 ya.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Belum termasuk transportasi.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Jadi ini saya pikir penting juga kita pertimbangkan, ini kan membebani APBN ya. Jadi saya sekali lagi mohon dicatat tadi setuju dengan beberapa masukan dari kawan-kawan itu, bahwa nanti kita akan detailkan lagi.

Oke untuk tahun 2023 ini kalau nanti ada percepatan-percepatan apa tadi, PJUTS itu dan juga Gatrik misalnya, listrik itu dibahas setelah ini kali Pak Ketua ya.

Baik, itu aja masukan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita menunggu-nunggu *nggak* keluar juga pantun mestinya Pak Tif, kita tunggu dari tadi.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Kasus-kasus verbal ini saya dari tadi hati-hati betul bicarannya. Soalnya dulu bagus *nggak* diadakan sama Mbak Ning *tuh*, kalau begitu saya ulangi lagi pantunnya tapi saya takut.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kita tunggu-tunggu kalimat otomatis, *nggak* keluar juga.

Baiklah, dari PKS silakan Ibu Diah.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri sedikit saja catatan saya terkait dengan anggaran 2023 dan mudah-mudahan tidak terulang di 2024, saya sudah sampaikan kepada Dirjen EBTKE terkait dengan kehandalan pembangunan PJUTS. Di daerah saya dari 300 titik itu 50 mati total, itu *kan* catatannya sangat besar dan sampai hari ini masih belum diselesaikan.

Jadi secara pribadi saya terus-menerus mendapatkan masukan, ini kapan mau diselesaikan. Dulu waktu di awal banyak kasus yang lubang ditinggalkan dan sebagainya sampai ada kecelakaan kerja, sampai kecelakaan masyarakat yang kita yang harus bertanggung jawab dengan itu. Ini jadi catatan besar dalam program PJUTS ke depan terkait dengan kontraktor, pelaksana atau apapun juga supaya ya tadi ya *reliability*-nya bisa dipertanggungjawabkan.

Yang kedua Pak Menteri, ini terkait dengan penetapan harga LPG 3 kilogram. Pertama, memang ini kan disubsidi ya oleh pemerintah, tetapi harga eceran itu kan ditetapkan oleh pemerintah daerah ya. *Nah* ini saya tidak tahu Pimpinan karena tolak ukurnya seperti apa pemerintah daerah itu menetapkan harga eceran.

Pada kenyataannya di lapangan masyarakat menjadi protes keberatan ketika sekarang ini harga eceran di daerah itu dinaik-naikkan oleh kepala daerah itu ya. Mereka tahunya kan kita yang menetapkan di sini harga apa subsidi dari LPG tersebut. *Nah* ini mungkin mekanisme ke depan, meskipun itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah barangkali bisa lebih diawasi atau di atur supaya tidak memberatkan untuk masyarakat.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, dipersilakan.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Sedikit Pimpinan, ini menyambungkan apa yang disampaikan Bu Diah.

Saya kira urusan PJUTS ini Pak Menteri, kontraktornya kayaknya perlu di evaluasi, kalau perlu diganti Pak, karena persoalannya banyak sekali, terutama juga di kampung saya juga begitu saya kira. Jadi usulan-usulan saya kira ini perlu di evaluasi kalau perlu diganti kontraktornya Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya Pak Menteri, tampaknya PJUTS perlu kita bentuk semacam *task force* untuk menuntaskan betul, supaya kita fokus betul penyelesaian-



penyelesaiannya karena ini hampir bersifat menyeluruh tentang kualitas, tentang ketepatan waktu dan sudah barang tentu yang penting adalah pemeliharaan ini dan seterusnya-seterusnya, memerlukan keputusan *affirmative policy*. Kebijakan yang betul-betul tentang *firm* tentang PJUTS.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, Saudara dari PAN dipersilakan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Kami memberikan apresiasi kepada kita semua yang *commit* untuk memberikan tambahan ya dan mendukung Kementerian untuk menaikkan anggaran.

Yang kedua, catatannya adalah apapun hasil pagu definitifnya, kami berharap pada Kementerian tidak mengurangi anggaran pipa gas Dumai-Sei Mangkei.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Luar biasa, jadi memang betapa strategisnya memang kepentingan Dumai-Sei Mangkei itu dalam proses transmisi dari Sumatera, West Java dan nyambung Cisem nyambung, Jambaran Tiung Biru dan seterusnya, di mana di tengah-tengah itu ada kawasan-kawasan industri yang saya kira nanti tidak lagi ada pertanyaan antara telur dan ayam, mana gasnya, mana industrinya terus-menerus dan sebagainya. Dan memang itu bagian dari strategis bagaimana kita memanfaatkan gas alam kita yang relatif besar, tetapi memerlukan infrastruktur.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Kalau melihat dari PPP tidak hadir ya. Saya kira kita anggap dari semuanya apa yang telah disampaikan oleh yang terhormat Anggota Komisi VII melalui berbagai pendapat tadi mengindikasikan bahwa Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM berkesimpulan bahwa:

Komisi VII menyetujui penambahan anggaran sejumlah Rp4.293.847.649.000,- sehingga anggaran pagu indikatif usulan, total pagu indikatif dari Rp6.776.152.351.000,- menjadi 11.070.000.000.000.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Kesimpulan kedua adalah, maaf kesimpulan ketiga adalah:

Komisi VII DPR RI menyetujui peningkatan alokasi, kok sampai jadi sudah mulai tajam ya, Komisi VII DPR RI menyetujui peningkatan alokasi anggaran Ditjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia diprioritaskan untuk digunakan pembangunan sistem pelayanan dan perizinan terpadu di sektor minerba.

Oh ini kemarin, betul ya ini hasil kesepakatan kemarin ya, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Kami persilakan Saudara Pak Menteri untuk menyampaikan semacam apa *closing statement*-nya.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas, pertama atas kehadirannya dan yang paling terutama adalah dukungannya dalam menetapkan RKAKL tahun 2024 Kementerian ESDM yang ditingkatkan dari 6,7 triliun menjadi 11,077. Anggaran tersebut akan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa meningkatkan kinerja, juga PNBPN, serta juga meningkatkan ketahanan energi nasional.

Adapun untuk masukan yang disampaikan tadi oleh Bapak-Ibu Anggota selama proses pembahasan dan penetapan asumsi dasar dan RKAKL 2024 akan menjadi perhatian kami untuk kita, kami tindaklanjuti dan akan memberikan dan mudah-mudahan akan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi.

Selanjutnya apabila ada hal-hal lain yang masih perlu kami lengkapi, kami akan melengkapi dengan jawaban tertulis nanti.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.



Terima kasih Pak Menteri dengan segenap jajarannya dan juga terima kasih segenap Pimpinan Komisi VII, serta Anggota Komisi VII yang terhormat.

Dengan demikian Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM yang tadi membahas tentang RKAKL pagu indikatif tahun 2024 saya nyatakan ditutup.

*Billahittaufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.32 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002



A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive-like mark.